

# PESANTREN DAN PENDIDIKAN POLITIK DI INDONESIA: Sebuah Reformulasi Kepemimpinan Islam Futuristik

*Mukodi*

STKIP PGRI Pacitan  
email: mukodi@yahoo.com

**Abstract:** *There is an increasing concern about discussing politics at pesantren (Islamic Boarding School), as if disuccing the politics was uncommonly happened there. This oddity is due to the conception of a person who puts pesantren merely a decontextualised scholarly reproduction of an-sich (from the real world problem or real politics) and not as an agent of change. In fact, pesantren is a replica of life integrating various life skills, including politics. The most interesting finding was that the diverse activities of life in the boarding school had raised the seedling of students' political sense. The existence of a political school (politics pesantren) became an alternative solution and a concrete answer to approach pesantren graduates as well as the potential Islamic youth working in the politics world. Besides, it was obtained through the leadership reformulation at pesantren (boarding school), such as: (1) applying the leadership curriculum and politics into schools curriculum; (2) intensifying leadership training; (3) holding a leadership transplant program; (4) seating qualified pesantren graduates becomes a leader; (5) Mentoring (coaching) youth leader at pesantren to accelerate the realization of the ideal leadership to Islamic version in Indonesia.*

**المخلص:** وهنا كقلقمترزا يدحولا لسياسة فيالمدارسالإسلاميةالداخلية (مدرسة داخلية إسلامية)، كمالو كاتمنافشة السياسة غير مألوفحدثهناك. هذا غرا ثبويرجعذ لكالمفهومالشخصا لذبيضعالعود العلماء مجرد وسيلة سيشا ستساخوهيلستسياقية (منمشكلةالعالمالحقيقيةأو السياسة الحقيقية) وليسعاملامنعواملاتغيير. يالواقع، المدارسالإسلاميةالداخليةهينسخةطبقالأصلمنحياةومجالمهاراتالحياتيةالمختلفة، بمافيدلكالسياسة. وكأهذا الا كتشا فالأكثرإثارةللأهتمامأنأنشطةمتنوعةمنالحياةفيمدرسةداخليةقدأثارالشتلا تمنا لحسالسياسيلدنالطلاب. وجود مدرسة سياسية (السياسة المدارسالإسلامية الداخلية)

ليك ونحلا بديلا وإجابة محددة لتهجر يجمي المدار سالا إسلامية الداخلية وكذلك للشباب بالاسلام مالم  
 حتملنا الذي نعملو نفيالسياسة العالمية. المجان بذلك، تالمصو لعلها منخل لإعادة صياغة القيا  
 دة في المدار سالا إسلامية الداخلية (مدرسة داخلية)، مثل: (1) تطبيق من هجا لقيادة والسياسة في من  
 اه جالمدارس. (2) تكثيف التدر يبع لالقيادة. (3) عقد برنا مجز راعا لقيادة؛ (4) لجلو سخر يجميال  
 مدار سالا إسلامية الداخلية المؤهلين بصحقاتنا. (5) التوجيه التدري ب) عيما للشباب في المدار سالا  
 اخلية لتسر يبع تحقيقا لقيادة المثالية إلى إصدار الإسلام في نديو نيسيا.

**Abstrak:** *Memperbincangkan dunia politik di pesantren, seolah menjadi hal yang taklazim. Ketidaklaziman ini lebih dikarenakan konsepsi seseorang yang menempatkan pesantren hanya sekadar tempat reproduksi keilmuan-sich, terpisah dari dunia nyata (real politik), bukan sebagai agen perubahan. Padahal senyatanya tidak demikian, pesantren adalah eplika kehidupan yang memadu pelbagai kecakapan hidup, tak terkecuali kecapan politik. Hasil kajian ini membuktikan bahwa beragam aktifitas kehidupan di pesantren telah mendorong tersemainya sense of politic parasantri. Keberadaan sekolah politik (pesantren politik) pun menjadi alternatif solutif, dan jawaban konkrit untuk merangkul alumni pesantren, dan kaum muda Islam yang potensial bergiat di dunia politik. Selain itu, melalui reformulasi kepemimpinan di pesantren, berupa: (1) memasukkan kurikulum kepemimpinan, dan politik kedalam kurikulum pesantren; (2) mengintensifkan pelatihan kepemimpinan; (3) mengadakan program pencangkokan kepemimpinan; (4) mendudukkan alumni pesantren yang berkualitas (qualified) menjadi pemimpin; (5) pendampingan (coaching) pemimpin muda di pesantren dapat mempercepat terwujudnya kepemimpinan ideal versi Islam di Indonesia.*

**Keywords:** pendidikan politik, pesantren, reformulasi, kepemimpinan.

## PENDAHULUAN

Belakangan ini perbincangan diakar rumput (*grassroot*) atas pernyataan KH. Said Agil Siraj, Ketua Umum PBNU kian menghangat. Ia berpendapat bahwa “Siapa saja yang mampu dan dipercaya rakyat, pemimpin yang adil meski itu non-Muslim tapi jujur, itu lebih baik daripada pemimpin Muslim tapi zalim. Di mana

saja dan siapa saja.”<sup>1</sup> Pernyataan tersebut, seolah mengirimkan sinyal betapa sulitnya menemukan figur pemimpin yang adil, dan amanah ditubuh umat Islam, khususnya di Indonesia. Lebih dari itu, pernyataan itu *momot* pesan simbolik yang bersayap.

Anasirnya di antaranya, *pertama*, pernyataan yang dilontarkan oleh Said Agil Siraj merupakan *statement personal*, tidak merepresentasikan pendapat PBNU secara kelembagaan. Walau pernyataan itu, dilontarkan di kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta. Sebab, memang sulit membedakan antara kapasitas seseorang atas nama pribadi, dengan atas nama kelembagaan (organisasi/institusi) pada saat dirinya menjadi pejabat publik. *Kedua*, autokritik kepada lembaga-lembaga Islam yang selama ini diagung-agungkan kaum *nahdhiyyin*, sebut saja pesantren-pesantren *salafiah*, dan madrasah *diniyyah* yang ‘gagal’ memproduksi pemimpin, atau calon kader pemimpin. *Ketiga*, menyindir, atau sekadar mengail respon para alumni lembaga Islam (alumni pesantren-pesantren *salafiyah*, dan *madrasah diniyyah*) yang mempunyai kapasitas, dan kredibel, tetapi cenderung menepi dalam arus perpolitikan nasional. *Keempat*, mengkritik, dan menegur partai politik berbasis Islam yang telah gagal menampilkan wajah keislamannya, bahkan tidak mampu meretas pemimpin yang adil, dan amanah. *Kelima*, gamang, dan prihatin betapa sulitnya mendapatkan pemimpin yang adil, dan amanah di negara yang mayoritas Islam dengan populasi penduduk terbesar keempat dunia. *Keenam*, pernyataan sikap politik PBNU merespon opini publik atas kriteria kepemimpinan ideal di Indonesia.<sup>2</sup>

Anasir-anasir tersebut di atas, seolah menjadi suatu kewajaran ditengah sulitnya menemukan figur pemimpin di Indonesia yang baik. Buktinya, data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah

---

<sup>1</sup>Hardani Triyoga, “Said Aqil: Mending Pemimpin Non-Muslim Tapi Jujur daripada Muslim Tapi Zalim,” *detiknews*, 16 April 2016, 1. Lebih dari itu, barangkali KH. Said Agil Siraj berpijak pada pendapat Ibn Taymiyyah yang mengatakan: “Allah akan menolong negara yang adil meskipun negara itu kafir. Dan Allah tidak akan menolong negara yang zalim meskipun negara itu mukmin (Islam). Lihat, Agus Sunaryo, “Symbolisme dan Essensialisme Kepemimpinan (Kajian Fikih Siyarah Tentang Sosok Pemimpin Ideal Menurut Islam),” *AKADEMIKA* 1 (Januari 2014): 72.

<sup>2</sup>Pernyataan kontroversial KH. Said Agil Siraj seperti ini bagi kaum *Nahdhiyyin* di akar rumput sudah menjadi hal yang biasa. Sebab, tokoh-tokoh NU sebelumnya juga tak kalah kontroversial, sebut saja KH. Wahab Hasbullah, *Rais Amm* pengganti *Rais Akbar* KH. Hasyim Asy’ari, Idam Chalid, dan KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

mencatat hingga Februari 2015 sebanyak 343 orang dari total 524 orang kepala daerah, dan wakil kepala daerah yang terjerat kasus korupsi.<sup>3</sup> Ironisnya lagi, mayoritas pelaku tindakan korupsi *notabene* beragama Islam, dan tidak sedikit di antara mereka berasal dari politik berlabel Islam.<sup>4</sup> Persoalan lainnya yang tak kalah pentingnya adalah hingga kini partai politik belum—untuk tidak mengatakan tidak—mampu melakukan pendidikan politik secara baik. Indikasinya sederhana, disetiap suksesi pemilihan umum mulai dari penjurangan bakal presiden, gubernur, wali kota, bupati, DPR, DPRD I, dan DPRD II partai politik selalu kesulitan mencari bakal calon. *Alhasil*, partai politik asyik masyuk merayu bakal calon eksekutif, dan legislatif diluar kader partai, mulai dari kaum akademisi, agamawan, seniman, pengusaha hingga artis papan atas merupakan potret buram kepemimpinan, dan politik di Indonesia. Pilgub DKI Jakarta yang menghadirkan Cagub-Cawagub di luar kader partai politik menjadi bukti nyata dari hal itu.<sup>5</sup> Oleh karena itu, artikel ini mencoba menemukan jawaban atas anasir-anasir tersebut di atas. Fokus kajian ini akandibatasi pada (1) konstruksi hubungan Islam, dan politik; (2) pesantren, dan pendidikan politik di Indonesia, serta; (3) reformulasi pendidikan kepemimpinan di pondok pesantren.

## HUBUNGAN ISLAM DAN POLITIK

Menyoal Islam dan politik sangatlah menarik, dan senantiasa aktual. Hal ini dikarenakan pendapat para ahli Islam yang mengatakan

---

<sup>3</sup>Sabrina Asril, “Mendagri: 343 Kepala Daerah Tersangkut Kasus Hukum,” *Kompas.com*, 4 Februari 2015.

<sup>4</sup>Lihat, “Suryadama Ali, Mantan Menteri Agama, sekaligus sebagai Ketua umum PPP (2007-2014), dan Lutfi Hassan Ishaq, Presiden PKS (2010-2015),” n.d., [http://www.kompasiana.com/anugrahoby/ternyata-nyaris-semua-pejabat-koruptor-dari-parpol-yang-mengaku-nasionalis\\_551b3de6a33311b023b65d43d44](http://www.kompasiana.com/anugrahoby/ternyata-nyaris-semua-pejabat-koruptor-dari-parpol-yang-mengaku-nasionalis_551b3de6a33311b023b65d43d44).

<sup>5</sup>Anis Baswedan adalah mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional berasal dari kalangan akademisi non partai politik dipinang oleh Partai Gerinda, dan PKS untuk menjadi Calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta, dipasangkan dengan Sandiaga Uno, dewan Pembina Partai Gerinda. Di sisi yang sama, Cagub Agus Harimurti Yudhoyono berasal dari kalangan militer dipinang oleh Partai Demokrat (PD), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Amanat Nasional (PAN), dipasangkan dengan Sylviana Murni, *notabene* sebagai pegawai negeri sipil aktif. Sementara itu, Cagub pertahana Basuki Tjahaya Purnama pun berasal dari non partai dilamar oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golongan Karya (Gorkar), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dipasangkan dengan Djarot Saiful Hidayat, pengurus partai PDIP.

Islam lebih dari sekadar sistem teologi: sebuah sistem kehidupan yang lengkap. Islam merupakan *dīn* (agama), dan sekaligus *dawlah* (negara).<sup>6</sup> Menurut Munawir Sjadzali terdapat tiga aliran di kalangan umat Islam dalam melihat Islam, dan politik. *Pertama*, aliran yang berpendirian bahwa Islam bukan semata-mata agama dalam pengertian Barat, yakni hanya menyangkut hubungan antara manusia, dan Tuhan, melainkan Islam adalah satu agama yang sempurna, dan lengkap dengan pengaturan bagi segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan bernegara. *Kedua*, aliran yang berpendirian bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat, yang tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan. *Ketiga*, aliran yang menolak pendapat bahwa Islam adalah suatu agama yang serba lengkap, dan Islam terdapat didalam sistem kenegaraan. Akan tetapi, aliran ini menolak anggapan bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat yang hanya mengatur hubungan antara manusia, dan Tuhannya. Aliran ini berpendirian bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara.<sup>7</sup>

Di sisi yang lain, Azyumardi Azra membagi pertautan antara Islam dan agama menjadi tiga. *Pertama*, pemisahan antara agama, dan politik. Kondisi seperti ini biasanya disertai dengan ideologi politik sekuler yang tidak bersahabat dengan agama (*religiously unfriendly secularism*). *Kedua*, pemisahan yang disertai ideologi yang bersahabat dengan agama (*religiously friendly ideology*), seperti di Indonesia. Penyebutannya pun biasa disebut sebagai akomodasi antara negara, dan agama. *Ketiga*, penyatuan agama, dan negara, seperti Arab Saudi yang dapat disebut teokrasi.<sup>8</sup> Pandangan Munawir Sjadzali, dan Azyumardi Azra tersebut pada hakikatnya saling menguatkan, yang menempatkan Islam, dan politik sebagai satu dimensi pemikiran. Masing-masing orang dapat melihat, dan menempatkan Islam, dan politik dalam satu garis pijakan, ataupun sebaliknya, tinggal memilih mana yang dijadikan rujukan.

Namun demikian, pelbagai pandangan, dan literatur kajian keislaman cenderung menegaskan bahwa hubungan antara Islam, dan

---

<sup>6</sup>Budhy Munawar Rahman, *Ensiklopedi Nurcholish Madjid Pemikiran Islam Di Kanvas Peradaban* (Jakarta: Penerbit Mizan, 2006), 2719–2720.

<sup>7</sup>Amirullah, “Hubungan Islam, dan Politik di Indonesia Serta Implikasinya Terhadap Pendidikan Islam,” *Jurnal Kreatif* XII, no. 1 (Januari 2015): 5.

<sup>8</sup>Ibid.

politik tidak dapat dipertautkan satu dengan lainnya.<sup>9</sup> Hubungan antar keduanya dimulai sejak awal kelahiran Islam itu sendiri. Meskipun hubungan antara agama, dan negara (politik) tidak pernah terlontar di zaman Nabi, dan Khulafaurrasyidin. Hal itu dikarenakan di masa-masa itu seluruh waktu, dan tenaga dicurahkan untuk menyebarkan, dan membela Islam.<sup>10</sup> Akan tetapi, Nabi Muhammad Saw. diyakini oleh umatnya bukan hanya sekadar seorang nabi, melainkan juga seorang (pemimpin) negarawan. Islam, dan politik pada dasarnya tidak terpisahkan. Islam tidak pernah memisahkan antara kegiatan profan, dan sakral, kecuali dalam pendekatannya. Artinya liputan Islam kepada segenap persoalan hidup, misalnya politik, sebenarnya terjadi terutama hanya pada level etisnya saja. Islam tidak pernah memberi detail-detail berpolitik. Ijtihad para pelaku politik menjadi kuncinya dengan memegang teguh prinsip-prinsip Islam.<sup>11</sup>

Lebih dari itu, hubungan antara Islam, dan politik biasanya merujuk pada peristiwa di *Thāqifah Banī Sa'īdah*,<sup>12</sup> dimana pada peristiwa itu ditetapkan kriteria pengangkatan *Khulafā al-Rāsīdīn*. Inilah dasar yang dijadikan tonggak ulama fiqh Sunni menjelaskan hubungan agama, dan negara. Para kritikus Islam berpendapat bahwa pertemuan yang dihelat di *Thāqifah Banī Sa'īdah* dinilai tidak direncanakan dengan matang, tergesa-gesa, dan tidak memiliki dasar

---

<sup>9</sup>Arfiansyah, "Pemikiran Politik Islam; Sebuah Tinjauan Sejarah Terhadap Arus Pemikiran Islam Klasik Sampai Awal Abad Ke 20," *SUBSTANTIA* 12 (Oktober 2010): 174.

<sup>10</sup>Muhammad Abid Aljabiri, *Agama, Negara, dan Penerapan Syariah*, terj. Mujiburrahman (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001), 14.

<sup>11</sup>Arfiansyah, "Pemikiran Politik Islam; Sebuah Tinjauan Sejarah Terhadap Arus Pemikiran Islam Klasik Sampai Awal Abad Ke 20," 2724. Perlu dipahami bahwa sejatinya, hanya sedikit dan itupun ringkas, ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang prinsip-prinsip politik. Pada satu sisi terdapat kewajiban untuk 13at kepada Rasul dan VIII Amri (yang bersifat syar'i) (QS. an-Nisa': 59 dan 80). Di sisi lain terdapat kewajiban bagi penguasa untuk bennusyawah dengan rakyat (QS. Ali 'Imran: 159). Selanjutnya tercantum: dorongan agar kaum Muslimin bermusyawah di antara sesama mereka (QS. asy-Syura: 38). Otoritas dan musyawarah merupakan dua unsur yang diperintahkan Tuhan bagi setiap bentuk pemerintahan. Sesuai dengan titik berat yang diletakkan pada salah satu dari kedua unsur tersebut, muncullah berbagai bentuk sistem politik. Baca, M. Arkoun dan Louis Gardet, *Islam Kemarin, dan Hari Esok*, trans. oleh Mujiburrahman (Bandung: Penerbit Pustaka, 1997), 5.

<sup>12</sup>*Thaqifah Bani Sa'īdah* merupakan balai pertemuan orang ansar, dan muhajirin untuk membahas kepemimpinan umat islam setelah nabi muhammad saw meninggal, baca. Abdul Chalik, "Fundamentalisme dan Masa Depan Ideologi Politik Islam," *Jurnal Islamica Junal Studi Keislaman*, n.d., 62.

teologis yang kuat. Apalagi tidak semua unsur sahabat penting hadir dalam musyawarah tersebut.<sup>13</sup>

Kelekatan hubungan antara Islam, dan politik secara kesejarahan pada hakikatnya bermula sejak awal kelahiran Islam itu sendiri, tepatnya sejak Nabi Muhammad Saw., dinobatkan sebagai nabi, dan rasul. Hanya saja persinggungan antar keduanya terjadi jauh sebelum masa kenabian Muhammad. Dalam kisah Nabi-nabi terdahulu, manusia sudah mengenal sistem pemerintahan, seperti zaman Nabi Ibrahim dengan rajanya “Namrudz” yang terkenal lalim.<sup>14</sup> Kemudian ketersingungan itu berlanjut secara terus menerus pada masa kepemimpinan Nabi Muhammad Saw., *Khulafā al-Rāshidīn, tābīn, tābi’ al-tābi’īn*—hingga sekarang. Dalam konteks keindonesiaan, hubungan Islam, dan politik pun menyatu padu, tak terpisahkan, seperti dua sisi mata uang. Catatan-catatan historis menyebutkan bahwa hubungan antara Islam, dan politik dimulai sejak masuknya Islam di nusantara,<sup>15</sup> hingga sekarang. Bahkan, taktik, dan strategi para wali songo dalam menyemaikan, dan menyebarkan agama Islam di nusantara kala itu juga menggunakan politik<sup>16</sup> sebagai salah satu alat dakwahnya.

Potret kelekatan Islam, dan politik di Indonesia secara eksplisit ditunjukkandengan adanya istilah Islam politik, dan Islam kultural pada dekade 80-an. Islam politik yang dimaksud adalah Islam yang memiliki orientasi kuat kepada politik, dan kekuasaan, sedangkan Islam kultural adalah Islam yang memiliki orientasi kepada pengembangan aspek sosio-kultural dari jalur non politik seperti dakwah secara damai, pendidikan, dan ekonomi.<sup>17</sup> Sebagai contoh *real*, para elit organisasi keagamaan, sebut saja Muhammadiyah, dan NU acapkali mempraktikkan peranan Islam politik, dan Islam kultural secara bergantian. Mereka diantaranya, KH. Wahab Chasbullah (1883-1971 M), KH. Wahid Hasyim (1914-1953 M), M. Natsir (1908-1993 M), KH. Abdurrahman Wahid (1940-2009

---

<sup>13</sup>Ibid., 62–63.

<sup>14</sup>Triono, “Corak Pemikiran Politik dalam Islam Zaman Klasik, Pertengahan dan Kontemporer,” *Jurnal TAPIS*, Juli 2011, 33.

<sup>15</sup>Penyebutan istilah Nusantara digunakan untuk menyebutkan Indonesia sebelum merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945.

<sup>16</sup>Baca, n.d., <http://islamnusantara.com/strategi-dakwah-wali-songo-dalam-islamisasi-di-jawa/>.

<sup>17</sup>Azyumardi Azra, “Revitalisasi Islam Politik dan Islam Kultural di Indonesia,” *Indo-Islamika* 1 (Februari 2012): 235.



M), dan Amin Rais (1944- M). Bahkan, KH. Wahab Chasbullah pun pernah melontarkan pendapat bahwa “Islam, dan politik ibarat gula, dan manisnya.<sup>18</sup>Dengan demikian, Islam, dan politik di Indonesia, baik dilihat dalam tataran historis, sosiologis, maupun praksis merupakan dua kesatuan yang saling melekat, keduanya tak bisa dipisahkan antara satu dengan lainnya.

## PONDOK PESANTREN DAN PENDIDIKAN POLITIK

Pondok Pesantren sebagai sub sistem pendidikan nasional hingga kini tetap diyakini sebagai salah satu pendidikan yang terbaik di bumi nusantara. Keberadaan pondok pesantren tetap mendapat tempat tersendiri di hati umat Islam, walau belakangan ini lembaga pendidikan modern lainnya kian berjubel. Lebih-lebih, bagi warga masyarakat nahdhiyyin yang tinggal di pedesaan (urban), alias masyarakat ‘pinggiran’. Bahkan, tidak sedikit masyarakat muslim puritan menganggap pendidikan pondok pesantren sama pentingnya dengan pendidikan formal (persekolahan) bagi buah hati mereka.<sup>19</sup>

Di pondok pesantren, para santri tidak hanya mendapatkan ilmu agama Islam, budaya literasi, manajemen diri, kecapan hidup (*life skill*), ilmu etika, bahkan dasar-dasar politik juga acapkali diperoleh. Hanya saja ukuran keberhasilannya tidak terukur, dan terstandarkan. Satu sama lainnya berbeda-beda, tergantung pada kesungguhan masing-masing, dan daya tangkap santri itu sendiri. Keberhasilan, dan ketuntasan pemahaman santri yang bersifat personal-kualitatif inilah yang menuai kritik tajam dari para kritikus dunia persekolahan modern.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup>Greg Fealy dan Greg Barton, *Tradisionaisme Radikal Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara* (Yogyakarta: LKiS, 2010), 22.

<sup>19</sup>Mukodi, *Menjaga Umat Pilar-Pilar Budaya Pondok Tremas di Era Global* (Yogyakarta: Lentera Kresindo, 2015), v.

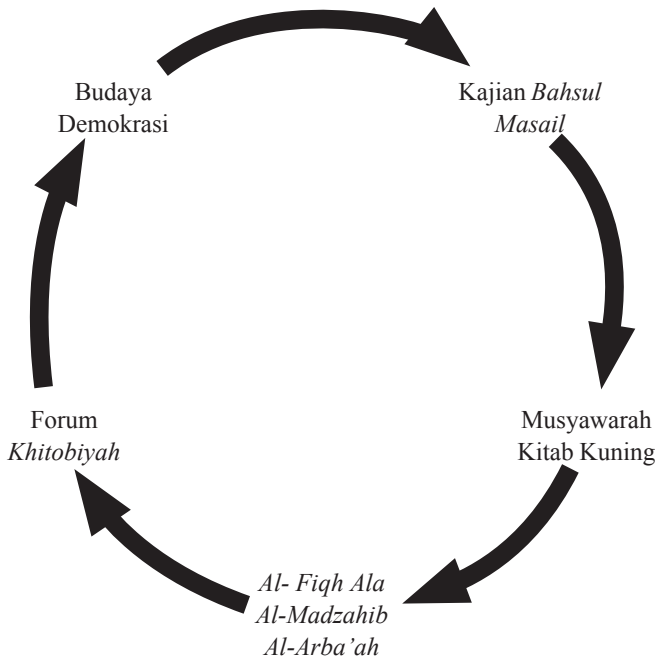
<sup>20</sup>Sebut saja, seperti Sutan Takdir Alisjahbana, ia mengkritik keras adanya pesantren tradisional. Menurutnya, sistem pendidikan pesantren harus ditinggalkan atau setidaknya, ditransformasikan sehingga mampu mengantarkan kaum muslim ke gerbang rasionalitas, dan kemajuan. Jika, pesantren dipertahankan, berarti mempertahankan keterbelakangan dan *kejumudan* kaum muslim. Nyatanya, analisis Takdir tersebut tidak semuanya benar adanya, *kejumudan* dan *kekolotan* pesantren tradisional justru mampu mempertahankan dan meneguhkan pesantren dengan sederet kekurangan dan kelebihan yang dimilikinya. Bahkan, alumni pesantren tradisional tidak sedikit yang berhasil menjadi publik figur di pentas nasional dan internasional. Sebut saja, Muhammad Khalil Bangkalan, Nawawi Banten, Mahfudz Tremas Pacitan, Abdur Karim, Saleh Darat, Hasyim Asyari, Wahid Hasyim, Jazuli Ploso Kediri, Wahab Abdullah Tambakberas, Bisri Sansuri Denanyar Jombang dan banyak lainnya. Lihat *Ibid.*, 5.



Pendidikan politik adalah salah satu ragam pendidikan yang dibangun, dan ditumbuhkembangkan di pondok pesantren. Akan tetapi, cara, dan metode tidak didesain, apalagi dipersiapkan secara baik. Bahkan, sang empunya—kiai, ustad, dan pengurus—tidak sadar jika telah mengajarkan nilai-nilai pendidikan politik di pesantren. Pelbagai aktivitas yang mengarah pada pendidikan dasar-dasar politik seperti kebebasan menyampaikan pendapat, menghargai perbedaan, toleransi, dan budaya telah terpraktikkan di pesantren.

Setidaknya ada lima aktifitas di pondok pesantren yang mengkondisikan para santri memahami nilai-nilai politik, yakni: 1) forum diskusi (musyawarah) kitab; 2) kajian *al-Fiqh 'alāal-Madhāhib al-Arba'ah*; 3) forum *khitābiyah*; 4) praktik budaya demokrasi; 5) kajian *bath al-masāil*. Lebih jelasnya dapat disajikan pada tabel 1 berikut ini:

**Gambar 1**  
**Dasar-Dasar Pendidikan Politik di Pondok Pesantren**



Adapun penjelasan masing-masing dari rincian Tabel 1 adalah sebagai berikut:

### Forum Diskusi (Musyawarah) Kitab Kuning

Arena diskursus akademik tumbuh kembang dengan subur di pondok pesantren salah satunya melalui aktifitas musyawarah kitab kuning. Budaya *shāwir*, atau musyawarah adalah tradisi diskusi mendalam mengenai topik pembahasan sebuah mata pelajaran. Diskusi ini bersifat dinamis, dan tak jarang, di sana terdapat dialektika ilmiah serta perdebatan akademik yang terjadi antar peserta musyawarah.<sup>21</sup> Forum musyawarah kitab kuning biasanya dihelat melalui dua ranah, yakni diranah musyawarah reguler yang diatur, dan didesain oleh pengurus pesantren; dan diranah musyawarah insidental yang diinisiasi oleh masing-masing kelas disetiap tingkatan, masing-masing pengurus kamar pondok,<sup>22</sup> dan organisasi kedaerahan asal santri secara mandiri.

Diskusi (musyawarah) kitab kuning menjadi momentum bagi santri dalam mengaktualisasikan diri mereka. Pendidikan politik pun acapkali mengalir begitu saja secara alami. Bahkan, terkadang para santri tidak menyadari jika diri mereka tengah mendapatkan, dan mempratikkan politik itu sendiri. Topik diskusi biasanya menyesuaikan konsensus peserta diskusi. Adakala mendiskusikan pokok-pokok pengajaran yang sulit. Adakala juga mendiskusikan tema-tema aktual. Sebut saja masalah hak, dan kewajiban warga terhadap negara, relasi agama, dan negara, masalah kepemimpinan, dan lain sebagainya.

Tesis, anti tesis, dan sintesis menjadi bumbu penyedap diarena diskusi (musyawarah) disetiap topik yang diangkat pada pembahasan diskusi. Pelbagai kitab referensi ditunjukkan, dan dibaca sebagai penguat argumentasi. Setiap santri dididik menjadi *orator*, *presenter*, sekalaigus *debater*. Hanya saja ciri khas diskusi (musyarawah) di pondok pesantren senantiasa mendudukkan pada sumber referensi terkuat (*jumhūr ‘ulamā’*) sebagai pemenang, bukan pada kehebatan logika nalar *presenter*, atau *debater*. Kontruksi pemikiran seperti ini yang menjadi ciri khas pesantren, yakni menonjolkan referensi (al-Quran, hadis, dan kitab kuning) ‘memalingkan’ logika. Kritik pedas seperti ini pernah dilontarkan Ulil Abshar Abdalla, dengan

---

<sup>21</sup>Helmy Faishal Zaini, *Pesantren Akar Pendidikan Islam Nusantara* (Jakarta: P3M, 2015), 44.

<sup>22</sup>Kamar-kamar pondok pesantren biasanya disebut dengan *namagotaan*, misalnya *Gotaan Firdaus*, *Gotaan Arr-Rahman*, *Gotaan Albanteni*, dan lain sebagainya.

mengatakan bahwa tradisi epistemologi-keilmuan kitab kuning yang dimiliki oleh pesantren selama ini masih berpusat pada pola pemikiran *ahl al-hadīth*, bukan pola *ahl ra'yu*.<sup>23</sup> Namun demikian, belakangan ini kaum santri mulai memadu, dan menyeimbangkan antara *ahl al-hadīth*, dan *ahl ra'yu*, antara *teks*, dan *konteks*.

### **Kajian *al-Fiqh 'alāal-Madhāhib al-Arba'ah***

*Kajian al-Fiqh 'alāal-Madhāhib al-Arba'ah* menjadi salah satu menu akademik tingkat tinggi bagi para santri senior. Dalam *al-Fiqh 'alāal-Madhāhib al-Arba'ah* ini disuguhkan pelbagai persoalan, sekaligus pembahasannya dari perspektif Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Safi'i, dan Imam Hambali, dan para pendukungnya masing-masing. Pendidikan politik didapatkan para santri pada saat mengkaji pokok kajian hukum, kenegaraan, dan hak asasi manusia.

Pokok pembahasan *bunghat*<sup>24</sup>--salah satu kajian politik Islam--misalnya, menjadi salah satu isu paling aktual dikalangan para santri pada saat KH. Abdurrahman Wahid akan, sedang, dan telah—pada Juni hingga Agustus 2001—dilensurkan oleh DPR. Sidang Istimewa MPR yang membuahkan *impeachment* kepada Presiden ke-4 Republik Indonesia, KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Tak ayal, pembahasan *bunghat* pun menjadi salah satu topik yang seksi, sekaligus fenomenal di pesantren. Peristiwa *impeachment* yang dilakukan oleh MPR kepada Gus Dur tersebut, menyadarkan, dan memantik dunia pesantren untuk memahami lebih mendalam tentang dunia politik. Berikut ini akan disajikan salah satu contoh diskursus para santri dalam memahami *bunghat* menurut *al-Fiqh 'alāal-Madhāhib al-Arba'ah*.

...menurut Ulama Hanafiyah al-bāghi adalah orang yang keluar dari ketaatan kepada imam yang hak dengan tanpa hak. Di sisi yang lain, Ulama Malikiyah berpendapat bahwa al-baghy[u] adalah mencegah diri untuk mentaati orang yang telah sah menjadi imam (khalifah) dalam

<sup>23</sup>Tradisi pemikiran pertama adalah tradisi pemikiran yang menjadikan aspek lahiriah, dan transmisi (riwayat) sebagai kecenderungan dalam mengkaji, dan memecahkan (*salving*) suatu masalah. Sementara itu, aspek rasionalitas kurang mempunyai *bargaining position* di sini. Oleh karena itu, mungkin kritik atas teks sangat berpeluang untuk ditabukan di sini. Baca Zaini, *Pesantren Akar Pendidikan Islam Nusantara*, 50.

<sup>24</sup>Bunghat adalah bentuk jamak *albaghi*, yang merupakan isim fail (kata benda yang menunjukkan pelaku), berasal dari kata *بَغَى* (*fi'il madhi*), *يُبَغِي* (*fi'il mudhari'*), dan *بُعْيَاءُ - بُعْيَاءُ - بُعْيَاءُ* (mashdar).

perkara bukan maksiat dengan menggunakan kekuatan fisik (mughālah), walaupun karena alasan ta`wil (penafsiran agama). Ulama Syafi'iyah berpendapat *bunghat* adalah kaum muslimin yang menyalahi imam dengan jalan memberontak kepadanya, tidak mentaatinya, atau mencegah hak yang yang seharusnya wajib mereka tunaikan (kepada imam), dengan syarat mereka mempunyai kekuatan (shawkah), ta`wil, dan pemimpin yang ditaati (muthā') dalam kelompok tersebut. Sementara itu, menurut Ulama Hanabilah *bunghat* diartikan orang-orang memberontak kepada seorang imam –walaupun ia bukan imam yang adil– dengan suatu ta`wilyang diperbolehkan (ta`wilsā'igh), mempunyai kekuatan (shawkah), meskipun tidak mempunyai pemimpin yang ditaati di antara mereka...<sup>25</sup>

Jadi, kajian ta`wil di pelbagai pondok pesantren di Indonesia diyakini dapat menumbuhkembangkan *sense of politic* para santri. Lebih dari itu, dapat mendidik dasar-dasar politik dalam hati sanubari para santri. Apalagi, topik-topiknya terkait dengan pembahasan kepemimpinan, kebangsaan, dan hak warga, terhadap negara.

### Forum *Khithābiyah*

Forum *khithābiyah* --dalam dunia persekolahan dikenal dengan sebutan orasi ilmiah-- merupakan ajang kontestasi akademik para santri untuk berproses menjadi (*learning to be*), serta menggelar ilmu yang mereka peroleh. Lebih dari itu, tak sedikit materi orasi ilmiah (*khithābiyah*) mengkritisi persoalan pemerintahan, dan perpolitikan tanah air. Di area inilah para santri mendapatkan pendidikan politik secara alamiah, tanpa didesain, maupun diprogram terlebih dahulu. Tak ayal, tatkala para santri kembali ke kampung halaman mereka masing-masing tidak sedikit diantara mereka yang terlibat ke dalam politik praktis, baik berkecimpung di partai politik Islam, maupun partai politik non Islam.

Tidak saja melatih dan mendidik paham persoalan politik, forum *khithābiyah* juga terkadang memantik para santri berfikir kritis terhadap isu-isu aktual perpolitikan nasional, dan internasional. Obrolan khas *ala* santri di kamar-kamar asrama pascak*khithābiyah* pun seringkali terjadi. Utamanya, menyangkut isu aktual, dan krusial kenegaraan.<sup>26</sup> Bahkan, di beberapa pondok pesantren *khalāfiyah*

<sup>25</sup>Lihat M. Shiddiq Al-Jawi, "Bughat (pemberontak) dalam Khazanah Fiqih Islam," n.d., www.fiqihunikabogor.com.

<sup>26</sup>Adakalanya mereka membahas teks, dan isi *khithābiyah* tanpa menindakkanjuti isu perpolitikan yang dilontarkan *orator* (petugas *khithābiyah*) yang mendapatkan jadwal giliran.

(modern) topik politik menjadi salah satu topik yang seksi, diminati para santri di ajang *khithābiyah*. Hal ini seolah memperjelas bahwa pondok pesantren sekarang ini<sup>27</sup> tidak lagi menutup diri, *tajarrud*,<sup>28</sup> dan anti realitas. Akan tetapi, ia mejadi salah satu tumpuhan yang bisa dijadikan pilihan dalam pembagunan bangsa. *Alhasil*, forum *khithābiyah* menjadi bagian terpenting dalam merenda pendidikan politik di pondok pesantren.

### **Parktik Budaya Demokrasi**

Kebebasan berpendapat dan menentukan pilihan yang menjadi ciri utama demokrasi sesungguhnya telah dipraktikkan menahun di pelbagai pondok pesantren di Indonesia. Hal itu tercermin dari cara santri memilih guru, dan kitab kuning pada saat *bandongan*, atau *wetonan*.<sup>29</sup> Kondisi semacam ini sama halnya laiknya Sistem Kredit Semester (SKS) pada dunia perkuliahan di perguruan tinggi. Lebih dari itu, kebebasan berpendapat, bersikap, dan berbuat juga dipratikkan oleh para santri dalam keseharian. Walau budaya *patron-client*<sup>30</sup> di pondok pesantren masih ada, namun kualitasnya mulai menurun sehingga para santri lebih independen dalam bersikap, berpendapat, dan bertindak.

---

<sup>27</sup>Dekade pesantren pasca tahun 1970-an lebih terbuka, dan adaptif terhadap perubahan zaman.

<sup>28</sup>Sikap mengisolir, dan membebaskan diri dari mencari nafkah. Lihat, KH. Wahab Chasbullah, "Syirkatul 'Inan Murabathoh Nadlatul Tujjar," in *Kumpulan Tulisan Majma' Buhuts An-Nahdliyyah (Forum Kajian Ke-Nu-An)* (Pati: Majma' Buhuts An-Nahdliyyah, 2014), 4.

<sup>29</sup>Sistem *wetonan* merupakan metode pengajaran di mana santri mengikuti pelajaran dengan duduk di sekeliling kiai yang membacakan kitab tertentu, sementara santri menyimak kitab masing-masing dan membuat catatan-catatan. Disebut dengan istilah *wetonan*, berasal dari kata *wektu* (istilah jawa untuk kata: waktu), karena pelajaran itu disampaikan pada waktu-waktu tertentu seperti sebelum atau sesudah shalat fardhu yang lima atau pada hari-hari tertentu. Lihat Mukodi, *Menjaga Umat Pilar-Pilar Budaya Pondok Tremas di Era Global*, 61.

<sup>30</sup>Teori ini dipopulerkan oleh James C. Scott dalam penelitiannya yang berjudul *patron-client politics and political change in southeast Asia* di muat di jurnal *American Political Science Association* vol. 66, no. 1 (mar., 1972). Konsep *patron-client relationship* dijelaskan sebagai berikut: *the patron-client relationship—an exchange relationship between roles—may be defined as a special case of dyadic (two-person) ties involving a largely instrumental friendship in which an individual of higher socioeconomic status (patron) uses his own influence and resources to provide protection or benefits, or both, for a person of lower status (client) who, for his part, reciprocates by offering general support and assistance, including personal services, to the patron.* Ibid., 63.

Gambaran kebebasan berpendapat (demokrasi) diilustrasikan Mukodi dalam temuan disertasinya di Pondok Tremas—salah satu pondok pesantren tertua di Indonesia—sebagai berikut:

Budaya kebebasan berpendapat merupakan kekhasan, sekaligus keunikan tersendiri di Pondok Tremas. Budaya kebebasan berpendapat, menyampaikan gagasan seolah mentradisi dan dijunjung tinggi di Pondok Tremas. Budaya demokrasi di Pondok Tremas pun tergambarkan dari tampilan para kiai yang dipraktikkan. Menurut penuturan sebagian santri senior dan dewan ustadh bahwa KH. Fuad, dan KH. Lukman sebagai pengelola, sekaligus pengasuh Pondok Tremas senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan berpikir. Hal ini tergambar secara jelas dalam pelbagai kesempatan, misalnya pada saat rapat dewan guru (*musyawarah akbar*) dalam pembahasan kurikulum, *bath al-masāil*, rapat dewan ma'arif pesantren, rapat wali santri, dan rapat pelbagai hal tentang kemaslahatan Pondok Tremas. Hampir dapat dipastikan di pelbagai rapat tersebut, tidak ada dominasi ide dan gagasan dari sang kiai, semuanya diserahkan kepada peserta sidang musyawarah, sehingga pelaksanaan rapat pun berjalan secara natural, penuh makna, serta mengedepankan kemaslahatan santri dan pesantren.<sup>31</sup>

### **Kajian *Bath Masāil***

Pendidikan politik yang didapatkan para santri dalam kajian *bath al-masāil*<sup>32</sup> sangat beragam, dan kenyal makna. Hal ini dikarenakan di setiap pokok bahasan *bath al-masāil* berbasis pada persoalan sosial kemasyarakatan. Persoalan kebangsaan, bela negara, dan politik nasional merupakan deret persoalan yang acapkali dicarikan solusi dalam kajian *bath al-masāil*. Hal ini tercermin pada contoh pembahasan *bath al-masāil* pada Muktamar NU ke-33 di Jombang, Jawa Timur, berikut ini:<sup>33</sup>

...Persoalan pemakzulan (pemberhentian) pemimpin. Pertanyaannya apa sebab-sebab pemimpin boleh diberhentikan? Jika seorang

---

<sup>31</sup>Mukodi, “Studi Fenomenologi Budaya Pondok Tremas di Era Globalisasi” (Universitas Negeri Yogyakarta, 2014), 162.

<sup>32</sup>Secara etimologi, *bahsul masail* terdiri dua suku kata, *bahsul* adalah pembahasan dan *masail* adalah pelbagai persoalan. Secara terminologi *bahsul masail* merupakan pembahasan atau pemecahan pelbagai persoalan, baik persoalan *ubudiyah*, *amaliyah*, maupun *muamalah* dengan menggunakan sumber kitab-kitab *fiqihmu'tabarah* untuk mencari jalan keluarnya. Ibid., 160.

<sup>33</sup>Lihat “Inilah Hasil Bahtsul Masail Muktamar NU ke-33 di Jombang,” *Bahtsul Masail*, 24 Agustus 2015, santri.net.

pemimpin telah melakukan hal-hal yang menyebabkan ia bisa diberhentikan, bagaimana proses tahapan pemberhentiannya? Jawabannya, mayoritas ulama berpendapat bahwa tidak ada penyebab yang menjadikan pemimpin dapat diberhentikan kecuali jika ia nyata-nyata melanggar konstitusi; Apabila telah terbukti bersalah dan ditetapkan secara hukum, maka pemimpin boleh dimakzulkan dengan cara: (a) direkomendasikan untuk mengundurkan diri; (b) apabila tidak mau mengundurkan diri dan tidak mau bertaubat, maka ia bisa dimakzulkan dengan aturan yang konstitusional selama tidak menimbulkan madharat yang lebih besar. Apabila pemimpin telah terbukti dan ditetapkan secara hukum melakukan hal-hal yang menyebabkannya dapat diberhentikan, maka proses tahapan pemberhentiannya sesuai dengan konstitusi yang berlaku...

Poin terpenting yang harus dipahami adalah bahwa melalui kajian *bath al-masāil* segenap civitas akademika pondok pesantren—kiai, keluarga kiai, pengelola, pengurus, ustad, *abdi dalem*, dan santri—dapat belajar, dan memahami persoalan politik secara mendalam. Selain itu, kajian *bath al-masāil* pada persoalan politik juga memantik *sense of politic*, sekaligus penyadaran politik bagi para santri di pondok pesantren. Lebih dari itu, keikutsertaan, dan keaktifan sivitas pondok pesantren dalam mengikuti pelbagai pembahasan *bath al-masāil* khususnya dalam topik-topik politik dapat mengkondisikan diri mereka secara *unconsciousness* pada ranah politik. Dikemudian hari, mereka tidak lagi alergi dengan praktik-praktik politik didunia nyata (di masyarakat), bahkan menjadikan politik sebagai bagian dari alat dakwah mereka.

## PENDIDIKAN POLITIK PASCA PESANTREN

Sub tema ini menjadi menarik didengarkan keras-keras tatkala mencermati realitas politik tanah air belakangan ini yang tidak memiliki postur, dan identitas yang jelas. Pasalnya, mayoritas partai politik di Indonesia seolah telah kehilangan *ruh*, dan ideologi kepartaiannya.<sup>34</sup> Pendidikan politik pasca di pondok pesantren pun menjadi salah satu tawaran yang cukup rasional. Alasannya sederhana, setelah para santri terkondisikan pendidikan politik selama di pesantren melalui lima

---

<sup>34</sup>Indikasinya sederhana, korupsi, makelar kasus, dan lain sebagainya diretas oleh pengurus parpol, dan anggota parpol. Ironisnya, partai politik belabel Islam pun terlibat didalamnya.



pilar, yakni melalui, 1) forum diskusi (musyawarah) kitab kuning; 2) kajian *al-fiqih 'ala arba'ah madhāhib*; 3) forum *khitābiyah*; 4) budaya demokrasi dalam kajian keilmuan; 5) kajian *bath al-masāil* diperlukan *reengenering* (perekayasa) pendidikan politik pasca di pesantren.

*Grand desain* pendidikan politik pasca pesantren bisa saja berupa adanya sekolah (kursus) politik di luar pesantren. Pilihan lainnya, didirikanlah pesantren khusus yang mempelajari politik, baik teori politik, maupun *real* politik. Syaratnya, calon santrinya adalah alumni pesantren tertentu yang telah memiliki pemahaman ilmu agama mendalam, sekaligus memiliki *sense of politic* yang kuat.<sup>35</sup> Pertanyaannya, mungkinkah itu terjadi? Jawabnya, sangat mungkin, dan peluangnya terbuka lebar. Secara historis, kursus politik pernah dipraktikkan H.O.S. Cokro Aminoto<sup>36</sup> yang mendidik ilmu politik kepada Ir. Soekarno,<sup>37</sup> Semaoen,<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup>Seyogyanya persyaratan menjadi santri pondok politik ditetapkan secara ketat, yang dikejar adalah kualitas santri, bukan kuantitas. Taktis pengelolaan pesantren politik dapat diformat sedemikian rupa. Suatu misal, *Jam'iyah Nahdhotul Ulama*, atau *Muhammadiyah* dapat mengambil peranan. Ia mendirikan pesantren politik, atau lembaga politik secara resmi di bawah badan otonomnya. Kemudian mendesain kurikulum, mengorganisir para tutor yang *notabene* para politisi senior yang kompeten, dan mendiskusikan persoalan politik, dan *real* politik di lapangan. Pilihan lainnya, seseorang yang mempunyai kepedulian atas nasib perjuangan Islam diranah politik dapat mendirikan pesantren politik secara swadaya, dan swadana dengan melibatkan pelbagai *stakeholder* yang peduli atas nasib bangsanya.

<sup>36</sup>Ia adalah pendiri, sekaligus pemimpin Sarekat Islam Indonesia. Lahir di Tegalsari, Ponorogo, Jawa Timur, 16 Agustus 1882 dan meninggal di Yogyakarta, 17 Desember 1934 pada umur 52 tahun. Salah satu trilogi darinya yang termasyhur adalah *Setinggi-tinggi ilmu, semurni-murni tauhid, sepintar-pintar siasat*. Pesannya kepada murid-muridnya, "Jika kalian ingin menjadi Pemimpin besar, menulislah seperti wartawan, dan bicaralah seperti orator".

<sup>37</sup>Soekarno 'mondok' di rumah Tjokroaminoto pada usia 15 tahun. Ayah Soekarno, Soekemi Sosrodihardjo, menitipkan Soekarno yang melanjutkan pendidikan di Hoogere Burger School (HBS). Saat itu, tahun 1916, Tjokroaminoto sudah menjadi Ketua Sarekat Islam, organisasi politik terbesar dan yang pertama menggagas nasionalisme. Lihat, Iqbal Fadil, "Kisah 3 murid Tjokroaminoto: Soekarno, Semaoen, Kartosoewirjo," *Merdeka.com*, 6 September 2012.

<sup>38</sup>Semaoen, lahir di kota kecil Curahmalang, Mojokerto, Jawa Timur sekitar tahun 1899, dan meninggal pada tahun 1971 di usia 72 tahun. Ia adalah Ketua Partai Komunis Indonesia (PKI) pertama. Kemunculannya di panggung politik pergerakan dimulai di usia belia, 14 tahun. Saat itu, tahun 1914, ia bergabung dengan Sarekat Islam (SI) wilayah Surabaya. Baca, Hasan Kurniawan, "Semaoen dan Pemogokan Buruh Kereta Api Mei 1923," *Sindonews.com*, 2 Mei 2016.

Alimin,<sup>39</sup> Muso, Kartosuwiryo,<sup>40</sup> dan Tan Malaka<sup>41</sup> pada waktu *ngekos* di rumahnya. Praktik serupa pada dekade yang berbeda pernah dirintis oleh Nurcholis Madjid sepulangnya dari Chicago dengan kegiatan diskusi di Yayasan Paramadina—sekarang bermetamorfosis menjadi Universitas Paramadina—yang menghebohkan. Satu istilah populer yang dilontarkan sekaligus menimbulkan polemik di kalangan santri pada 1970-an adalah idenya tentang “sekularisasi, dan “Islam *yes*, partai Islam *no*.”<sup>42</sup>

Melalui pendidikan politik pasca pesantren diharapkan dapat melahirkan kaderisasi politikus yang berkarakter Islami. Cakap, dan matang dalam berpolitik, serta memegang teguh nilai-nilai keislaman. Lebih dari itu, lembaga ini nantinya dapat mempersiapkan regenerasi politisi Muslim kontemporer yang berkarakter Islami.<sup>43</sup> Jika, dalam sejarah pertumbuhan nasionalisme Indonesia dikenal generasi 1908, 1928, 1945, 1966, 1998, dan 2000-an, maka melalui pesantren politik (pendidikan politik pasca pesantren) ini akan membuat generasi baru. Bukan tidak mungkin jika retasan alumni pesantren politik tersebut *acceptable* (diterima), *credibel* (masuk akal: dipercaya), dan berkualitas tentunya dapat mengubah peta

---

<sup>39</sup>Alimin adalah seorang tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia serta tokoh komunis Indonesia yang lahir di Solo pada 1889, dan meninggal di Jakarta, 24 Juni 1964. Berdasarkan SK Presiden No. 163 Tahun 1964 tertanggal 26/6/1964, Alimin tercatat sebagai salah satu Pahlawan Nasional Indonesia. Baca, Eko Setiawan, “Alimin,” *Merdeka.com*, 10 November 2015.

<sup>40</sup>Kartosowirjo lahir di Cepu, Jawa Tengah, pada 7 Januari 1905, dan meninggal di Kepulauan Seribu, DKI Jakarta, 5 September 1962 pada umur 57 tahun. Ia begitu mengagumi dan terpesona dengan Tjokroaminoto yang sering berpidato dalam berbagai pertemuan. Kartosowirjo melamar menjadi murid dan mulai mondok di rumah Ketua Sarekat Islam itu di Surabaya. Untuk membayar uang pondokan, Kartosowirjo bekerja di surat kabar Fadjar Asia milik Tjokroaminoto. Ketekunan dan kecerdasan membuatnya menjadi sekretaris pribadi Tjokroaminoto. Lihat, Wikipedia, “Sekarmadji Maridjan Kartosowirjo,” *Wikipedia.org*, 10 Oktober 2016.

<sup>41</sup>Tan Malaka atau Sutan Ibrahim gelar Datuk Tan Malaka (lahir di Nagari Pandam Gadang, Suliki, Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, 2 Juni 1897 – meninggal di Desa Selopanggung, Kediri, Jawa Timur, 21 Februari 1949 pada umur 51 tahun) adalah seorang pembela kemerdekaan Indonesia yang berpihak pada golongan sayap kiri bersama dengan tokoh-tokoh Partai Komunis Indonesia, juga pendiri Partai Murba, dan merupakan salah satu Pahlawan Nasional Indonesia. Lihat, Dadan Gantar, “Biografi Tan Malaka,” *academia.edu*, 2016.

<sup>42</sup>Abdul Munir Mul Khan, *Runtuhnya Mitos Politik Santri Strategi Kebudayaan dalam Islam* (Yogyakarta: Sypress, 1999), 115.

<sup>43</sup>Maksudnya, karakter *Ilahiyah* kenabian, berupa *sidiq* (jujur), *amanah* (tepercaya), *tabligh* (penyampai yang baik), dan *fathanah* (cerdas).

perpolitikan nasional di masa depan. Kondisi ini, laiknya dinamika kehidupan Islam pada dekade 1990-an pasca lahirnya ICMI yang menandai kristalisasi pergeseran pola kepemimpinan ulama ke arah pola intelektualisme dalam proses regenerasi Muslim. Bedanya, jika ICMI terkonstruksi elitis, maka alumni pesantren politik terkondisikan menjadi pribadi yang agamis (ulama), intelek, sekaligus populis.

Poin terpenting harus diperhatikan adalah kehadiran pesantren politik di Indonesia menjadi momentum adanya reformulasi kepemimpinan Islam secara alami, dan *genuine* (hakiki). Praktis, politik, dan persoalan kenegaraan (bangsa, dan negara) menjadi persoalan bersama (seluruh lapisan masyarakat). Area politik menjadi area yang populis, tidak tabu, apalagi elitis. Muaranya, masyarakat awam yang ditandai kaum santri mendapatkan pendidikan politik secara nyata. Lebih dari itu, dikarenakan *stok* calon politisi yang berasal dari alumni pesantren melimpah, maka partai politik lebih leluasa merekrut kader, pengurus kepartaian, dan calon legislatif bermutu. Paling tidak, melalui pesantren politik akan menyiapkan, dan mematangkan modal agama, modal intelektual, modal kultural, dan modal sosial santri. Sementara modal kapital untuk menjadi politisi yang sesungguhnya berada pada individu, dan partai politik masing-masing. *Ijtihad leadership* Islam inilah meminjam bahasa M. Nashir<sup>44</sup> disebut sebagai perjuangan Islam melalui jalur politik.

## **REFORMULASI PENDIDIKAN KEPEMIMPINAN DI PONDOK PESANTREN**

Sebagaimana telah diuraikan pada pembahasannya sebelumnya, bahwadi Indonesia tengah terjadi krisis kepemimpinan. Persoalan itu harus segera diatasi, dan dicarikan solusi. Jika, tidak segera diatasi dipastikan bangsa, dan negara akan menuai kehancuran secara masif. Salah satu solusi alternatif atas persoalan itu adalah dengan melakukan perekayasaan (*reengineering*) formula pendidikan kepemimpinan pondok pesantren di Indonesia. Reformulasi pendidikan kepemimpinan di pondok pesantren dapat dilakukan

---

<sup>44</sup>Peletak pola dasar perjuangan Islam melalui saluran politik dibawah bendera Masyumi. Pada tahun 1952 di tengah ribuan peserta Mukhtar Masyumi ia berkata: "... Kita, kaum Muslimin Indonesia yang merupakan bagian penduduk yang terbanyak, memikul tanggungjawab yang terbesar terhadap keselamatan, dan pembangunan Negara Republik Indonesia selanjutnya...". Lihat Mulkhan, *Runtuhnya Mitos Politik Santri Strategi Kebudayaan dalam Islam*, 141.

melalui lima langkah, yakni:

*Pertama*, memasukkan kurikulum kepemimpinan, dan politik kedalam kurikulum pondok pesantren. Kurikulum merupakan instrumen untuk mencapai tujuan pendidikan, tak terkecuali tujuan kepemimpinan (*leadership*), dan politik. Kealfaan pondok pesantren di Indonesia dalam menyajikan menu kepemimpinan, dan politik berdampak buruk pada nasib bangsa, dan negara di masa depan. Dengan demikian, diperlukan adanya kurikulum kepemimpinan, dan politik di pondok pesantren. Cara kerjanya dapat diformat melalui tigarana, yakni: (1) dimasukkannya mata pelajaran kepemimpinan, dan politik secara formal kedalam kurikulum di pondok pesantren. Mata pelajaran tersebut dapat diajarkan melalui sistem pengajian klasikal, maupun *bandongan*; (2) kajian kepemimpinan, dan politik dijadikan menjadi mata pelajaran wajib sebagaimana mata pelajaran *tauhid, aqidah, fiqih, al-Qur'an hadis, tajwid*, dan lain sepadannya; (3) pelbagai kegiatan keorganisasian di pondok pesantren diwajibkan mengkaji kepemimpinan, dan politik.

*Kedua*, mengintensifkan pelatihan kepemimpinan di pondok pesantren. Pelatihan ini didasarkan pada teori kepemimpinan. Perdebatan apakah pemimpin itu bawaan (*given*), atau diciptakan (*made*) hingga kini masih mengemuka. Namun demikian, klasifikasi teori kepemimpinan pada umumnya mengerucut pada tiga mainstream kelompok besar, yaitu kelompok teori sifat (*trait*), perilaku (*behavioral*), dan kontigensi (*contingency*).<sup>45</sup> Adanya pelbagai pelatihan kepemimpinan di pondok pesantren dapat membantu memahami bagaimana cara menjadi pemimpin yang baik, walau hanya sebatas teori.

*Ketiga*, mengadakan program pencangkakan kepemimpinan di pondok pesantren. Program pencangkakan kepemimpinan menjadi penting mengingat sedikit sekali pemimpin (Islam) yang terlahir dari institusi pondok pesantren. Padahal, jumlah pondok pesantren berlimpah, akan tetapi kualitas alumni yang memiliki kapasitas, dan kreteria kepemimpinan (*leadership*) sangat terbatas. Melalui konsorsium pondok pesantren (lembaga pendidikan Islam, dan organisasi sosial keagamaan) dapat membuat kebijakan *pencangkakan*, laiknya program praktik lapangan (PPL), atau kelas

---

<sup>45</sup>Maria Merry Marianti, "Teori Kepemimpinan Sifat," *Bina Ekonomi Majalah Ekonomi Unpar* 13 (Januari 2009): 52.

magang di dunia persekolahan. Dengan begitu, para kiai (pengelola pondok) dapat menugaskan wakilnya (guru, dan santri) bahkan dirinya sendiri untuk belajar di pondok pesantren lainnya. Selain itu, para kiai pun dapat mengirimkan putra-putrinya (*gus, ning*) ke pondok pesantren lainnya untuk mendalami kepemimpinan, dan pengelolaan suatu pesantren. Di sisi yang sama, para pengurus organisasi keagamaan (NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad) dapat pula melakukan hal yang sama, yakni mengirimkan para pengurusnya untuk saling belajar antara organisasi yang satu dengan lainnya dibidang *leadership*.

*Keempat*, mendudukkan alumni pondok pesantren yang *qualified* (berkualitas) menjadi pemimpin publik. Banyak alumni pesantren yang berkualitas tetapi peranannya di masyarakat sangat terbatas, yakni hanya menjadi guru *ngaji* atau *dai kampung*. Padahal, keilmuan mereka dibidang agama, kepemimpinan, kewirausahaan, politik, dan bidang-bidang lainnya dapat diandalkan. Penyebabnya dari keterbatasan peranan alumni pesantren yang dimaksud tentunya bersifat kasuistik, dan kualitatif. Hanya saja, salah satu penyebab terbesar darinya adalah minimnya kesempatan, dan ruang kontestasi yang diberikan masyarakat (tokoh masyarakat, pemilik modal) kepada mereka. Apalagi, jika mereka tidak memiliki modal kultural, dan kapital yang cukup memadai di kampungnya. Diarea inilah diperlukan *personal garansi* (jaminan seseorang), baik dari para kiai, tokoh masyarakat, pemilik modal, maupun organisasi keagamaan (NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, dan lainnya) agar mereka diberikan kesempatan berkontestasi (berdakwah, dan mengabdikan) di masyarakat. Model seperti barangkali cukup efektif diberlakukan ditengah menjalarnya materialisme, pragmatisme, dan hedonisme bawaan dunia globalisasi yang tengah menjangkiti masyarakat.

*Kelima*, pendampingan (*coaching*) pemimpin muda di pesantren. Langkah taktis ini menjadi penting, sebab biasanya pemimpin muda (junior) dalam menjalankan proses kepemimpinan jatuh bangun sendirian, dan para seniornya melihat dari kejauhan. Padahal, mereka terkadang butuh bimbingan, arahan, dan pendampingan. Model *coaching* kepada pemimpin junior ini dapat diterapkan oleh pondok pesantren. Agar kepemimpinan yang dijalankannya lebih efektif, dan dapat mencapai tujuan institusionalnya—visi, dan misi kelembagaan—secara baik. Lebih-lebih, jika pondok pesantren

tersebut mempunyai basis massa di akar rumput (Kecamatan, Kabupaten, Propinsi, dan Nasional) tentunya lebih efektif.

Kelima langkah taktis tersebut di atas, dapat mendorong terjadinya percepatan lahirnya kepemimpinan ideal disemua level. Sebuah negara ideal<sup>46</sup> selalu meniscayakan adanya pemimpin yang ideal, yaitu pemimpin yang dalam dirinya terpenuhi kecakapan untuk memimpin. Kecakapan ini bersifat *naluriah (given)*, atau bersifat *malakah irādiyyah (by effort)*,<sup>47</sup> dan kelima langkah taktis tersebut menjadi bagian dari *ijtihad* menuju sifat *malakah irādiyyah* itu. Poin terpenting yang harus dipahami adalah terwujudnya reformulasi kepemimpinan dipelbagai pondok pesantren di Indonesia berkorelasi secara positif terhadap adanya percepatan kaderisasi calon pemimpin di semua elemen. Secara teoritis, dalam pandangan teori *Operant Conditioning* (S-R) yang dikembangkan oleh Skinner (1904-1980 M) menyebutkan bahwa setiap tindakan seseorang (Stimulus) akan menuai respon lanjutan. Dengan demikian, jika, para santri dikondisikan (S)—diberikan pemahaman tentang dasar-dasar kepemimpinan—, maka mereka akan mengalami perubahan sikap (R) dalam perbaikan kepemimpinan secara personal. Muaranya, dikemudian hari nantinya berimbas secara sistemik terhadap perbaikan kepemimpinan di skop kewilayahan (regional), dimana santri tinggal setelah ia pulang dari pondok pesantren, maupun di skop nasional tatkala ia ikut berkompetisi di politik praktis.

## PENUTUP

Pendidikan politik di dunia pondok pesantren menjadi salah satu tempat reproduksi calon pemimpin yang ideal di Indonesia. Hal ini dikarenakan kecakapan agama yang mempribadi pada jati diri santri

---

<sup>46</sup>Sistem ini, menurut al-Farabi diistilahkan dengan *al-madinah al-fāḍilah* (negara ideal), yaitu sistem pemerintahan yang berupaya menjadikan interaksi dan kerjasama antar anggota masyarakat sebagai pilar tercapainya kebahagiaan yang hakiki. Dalam sebuah negara ideal, masing-masing anggota masyarakat memiliki peran dan fungsi yang berbeda satu dengan yang lainnya. Namun demikian, perbedaan fungsi dan peran ini tidak kemudian dimaknai sebagai sebuah distingsi untuk menjalin hubungan dan kerjasama. Justeru, dengan adanya perbedaan peran dan fungsi, masing-masing anggota masyarakat dapat saling melengkapi satu sama lain, menutup kekurangan yang satu dengan kelebihan yang lain atau bisa saling menyadari akan keterbatasan masing-masing. Lihat Sunaryo, “Simbolisme dan Essensialisme Kepemimpinan (Kajian Fikih Siyasah Tentang Sosok Pemimpin Ideal Menurut Islam),” 61.

<sup>47</sup>Ibid.

dapat menjadi modal intelektual yang baik dalam menjiwai arah politik santri di masa depan. Konstruksi bangunan pendidikan politik di pondok pesantren telah terpraktikkan dalam kegiatan keseharian, berupa: (1) tersemainya arena pendidikan politik dengan baik di pesantren; (2) terwujudnya sekolah (kursus) politik bagi alumni pesantren yang potensial; (3) terwujudnya reformulasi pendidikan kepemimpinan di pesantren. Dengan demikian, pendidikan politik di pondok pesantren sejatinya merupakan *ijtihad ilmiah* untuk memantik, sekaligus pengungkit (*leverage*) terwujudnya calon pemimpin ideal versi Islam di Indonesia. Hanya saja, orientasi, dan tujuan perpolitikan *ala* santri bukan sekadar menjadikan kekuasaan sebagai tumpuan akhir, melainkan sebagai bagian dari instrumen dakwah dalam menjaga nilai-nilai kemanusiaan.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Aljabiri, Muhammad Abid. *Agama, Negara, dan Penerapan Syariah*. terj. Mujiburrahman. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001.
- Al-Jawi, M. Shiddiq. "Bughat (pemberontak) dalam Khazanah Fiqih Islam," n.d. [www.fiqihunikabogor.com](http://www.fiqihunikabogor.com).
- Amirullah. "Hubungan Islam, dan Politik di Indonesia Serta Implikasinya Terhadap Pendidikan Islam." *Jurnal Kreatif XII*, no. 1 (Januari 2015).
- Arfiansyah. "Pemikiran Politik Islam; Sebuah Tinjauan Sejarah Terhadap Arus Pemikiran Islam Klasik Sampai Awal Abad Ke 20." *SUBSTANTIA* 12 (Oktober 2010).
- Arkoun, M., dan Louis Gardet. *Islam Kemarin, dan Hari Esok*. terj. Mujiburrahman. Bandung: Penerbit Pustaka, 1997.
- Asril, Sabrina. "Mendagri: 343 Kepala Daerah Tersangkut Kasus Hukum." *Kompas.com*, 4 Februari 2015.
- Azra, Azyumardi. "Revitalisasi Islam Politik dan Islam Kultural di Indonesia." *Indo-Islamika* 1 (Februari 2012).



- Chalik, Abdul. "Fundamentalisme dan Masa Depan Ideologi Politik Islam." *Jurnal Islamica Junal Studi Keislaman*, n.d.
- Chasbullah, KH. Wahab. "Syirkatul 'Inan Murabathoh Nadlatul Tujjar." In *Kumpulan Tulisan Majma' Buhuts An-Nahdliyyah (Forum Kajian Ke-Nu-An)*. Pati: Majma' Buhuts An-Nahdliyah, 2014.
- Fadil, Iqbal. "Kisah 3 murid Tjokroaminoto: Soekarno, Semaoen, Kartosoewirjo." *Merdeka.com*, 6 September 2012.
- Fealy, Greg, dan Greg Barton. *Tradisionaisme Radikal Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara*. Yogyakarta: LKiS, 2010.
- Gantar, Dadan. "Biografi Tan Malaka." *academia.edu*, 2016.
- "Inilah Hasil Bahtsul Masail Muktamar NU ke-33 di Jombang." *Bahtsul Masail*, 24 Agustus 2015. santri.net.
- Kurniawan, Hasan. "Semaoen dan Pemogokan Buruh Kereta Api Mei 1923." *Sindonews.com*, 2 Mei 2016.
- Marianti, Maria Merry. "Teori Kepemimpinan Sifat." *Bina Ekonomi Majalah Ekonomi Unpar* 13 (Januari 2009).
- Mukodi. *Menjaga Umat Pilar-Pilar Budaya Pondok Tremas di Era Global*. Yogyakarta: Lentera Kresindo, 2015.
- Mukodi. "Studi Fenomenologi Budaya Pondok Tremas di Era Globalisasi." Universitas Negeri Yogyakarta, 2014.
- Mulkhan, Abdul Munir. *Runtuhnya Mitos Politik Santri Strategi Kebudayaan dalam Islam*. Yogyakarta: Sipress, 1999.
- Rahman, Budhy Munawar. *Ensiklopedi Nurcholish Madjid Pemikiran Islam di Kanvas Peradaban*. Jakarta: Penerbit Mizan, 2006.
- Setiawan, Eko. "Alimin." *Merdeka.com*. 10 November 2015.
- Sunaryo, Agus. "Simbolisme dan Essensialisme Kepemimpinan (Kajian Fikih Siyash Tentang Sosok Pemimpin Ideal Menurut Islam)." *AKADEMIKA* 1 (Januari 2014).

“Suryadama Ali, Mantan Menteri Agama, sekaligus sebagai Ketua umum PPP (2007-2014), dan Lutfi Hassan Ishaq, Presiden PKS (2010-2015),” n.d. [http://www.kompasiana.com/anugrahoby/ternyata-nyaris-semua-pejabat-koruptor-dari-parpol-yang-mengaku-nasionalis\\_551b3de6a33311b023b65d43dkk](http://www.kompasiana.com/anugrahoby/ternyata-nyaris-semua-pejabat-koruptor-dari-parpol-yang-mengaku-nasionalis_551b3de6a33311b023b65d43dkk).

Triono. “Corak Pemikiran Politik dalam Islam Zaman Klasik, Pertengahan dan Kontemporer.” *Jurnal TAPIS*. Juli 2011.

Triyoga, Hardani. “Said Aqil: Mending Pemimpin Non-Muslim Tapi Jujur daripada Muslim Tapi Zalim.” *detiknews*, 16 April 2016.

Wikipedia. “Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo.” *Wikipedia.org*, 10 Oktober 2016.

Zaini, Helmy Faishal. *Pesantren Akar Pendidikan Islam Nusantara*. Jakarta: P3M, 2015.